



# RENCANA STRATEGIS

## DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS

### TAHUN 2021 - 2026



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 ini telah selesai disusun sesuai amanat peraturan perundang-undangan..

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis ini merupakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun, disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan dari faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Didalam penyusunan renstra ini, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis telah mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan-perubahan strategis yang dihadapi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026, merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, rencana program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis. Dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis ini juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bengkalis pada akhir periode RPJMD.

Demikian Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026 ini disusun. Harapan kami, renstra ini dapat dijadikan acuan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Aamiin Ya Robbal'alamin.

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	5
1.3    Maksud dan Tujuan .....	8
1.4    Sistematika Penulisan .....	8
BAB II    GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS.....	12
2.1    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu.....	12
2.2    Sumber Daya Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu .....	20
2.3    Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu.....	26
2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Bengkulu .....	31
BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS.....	33
3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu.....	33
3.2    Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	37
3.3    Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Propinsi/ Kabupaten/Kota .....	41
3.4    Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) dan Kajian Lingkungan Hidup .....	43
3.5    Penentuan Isu-Isu Strategis.....	44

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN .....	47
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis.....	47
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	49
	5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis .	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	55
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN .....	64
BAB VIII	PENUTUP .....	66
LAMPIRAN		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu untuk periode 5 (lima) tahun, disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Bengkulu.

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan perkebunan berkelanjutan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan

tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perkebunan.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Proses penyusunan Renstra SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis diawali dengan Pembentukan tim penyusun Renstra SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD

Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat eselon II, III dan IV Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran dengan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis sebagai Penanggung jawab, Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis sebagai Ketua, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program sebagai Sekretaris dan anggota sebanyak 7 orang yang terdiri dari Kepala Bidang dan Staf Penyusunan Program pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra OPD
2. Orientasi mengenai Renstra OPD
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra OPD

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra OPD disusun ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran hingga verifikasi rancangan Renstra OPD sebagai bahan musrenbang.

Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra OPD dengan penyusunan RPJMD.

4. Pengumpulan Data dan Informasi  
Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra OPD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perumusan rancangan
6. Pengolahan data/informasi
7. Analisis gambaran pelayanan
8. Perumusan isu-isu strategis

9. Perumusan visi-misi-tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun
10. Penyusunan rancangan akhir
11. Pengesahan Bupati serta penetapan oleh Kepala Dinas untuk dapat dilaksanakan.

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten  
Bengkalis  
Tahun 2021-2026



Dalam penyusunan Renstra OPD perlu adanya sinkronisasi/keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota. Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis. Renstra SKPD ini merupakan pedoman bagi OPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang kemudian digunakan sebagai acuan menyusun program dan kegiatan OPD. Secara skematis, hubungan dokumen perencanaan dan anggaran ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2

## Keterkaitan Penyusunan RPJMD dengan RENSTRA OPD



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
- 2) Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

- 7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- 8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 9) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
- 19) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 22) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
- 29) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud:

- 1) Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan fungsinya.

#### **1.3.2 Tujuan**

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu.
- 2) Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- 3) Memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Perkebunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
- 4) Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Perkebunan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perkebunan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### BAB VIII PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS**

### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis**

Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Susunan organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

#### **2.1.1 Tugas**

Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas yakni membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perkebunan.

#### **2.1.2 Fungsi**

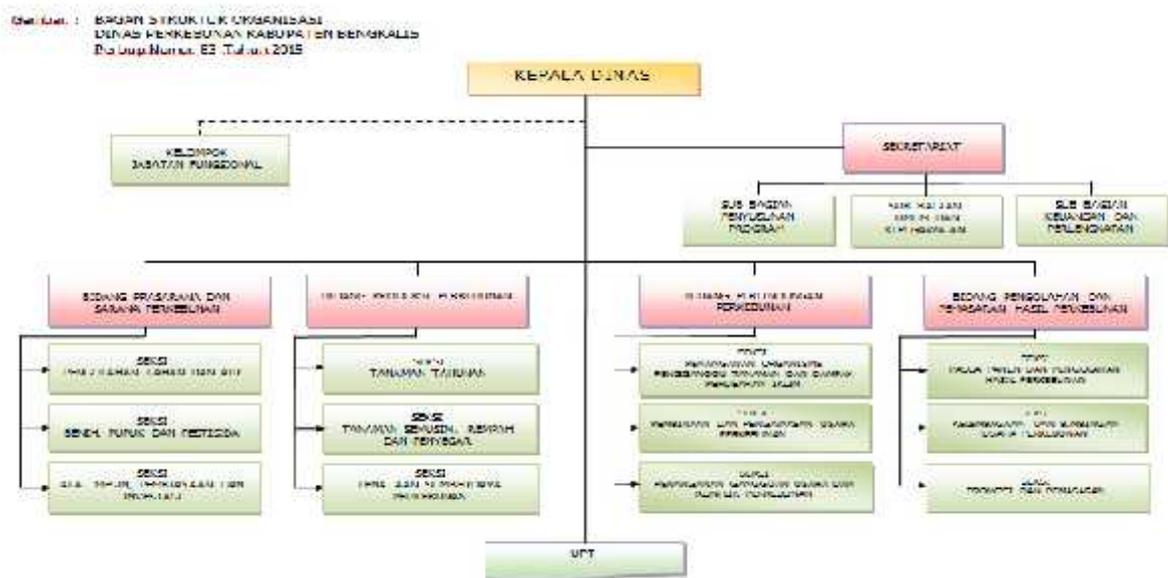
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi yaitu;

- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan dan bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan hasil perkebunan;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, perlindungan perkebunan dan bidang pengolahan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, perlindungan perkebunan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, perlindungan perkebunan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, perlindungan perkebunan dan bidang pengolahan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. pemantauan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan, perlindungan perkebunan dan bidang pengolahan dan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. pemantauan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan;
- h. pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan dinas perkebunan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, terdiri dari Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 6 (enam) orang dan Eselon IV sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan pembagian sebagai berikut:



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
  - b. Seksi Benih, Pupuk, Pestisida Pestisida;

- c. Seksi Alat Mesin, Pembiayaan dan Investasi.
4. Bidang Produksi Perkebunan, terdiri dari:
  - a. Seksi Tanaman Tahunan;
  - b. Seksi Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar;
  - c. Seksi Penataan Sumberdaya Perkebunan.
5. Bidang Perlindungan Perkebunan, terdiri dari :
  - a. Seksi Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan;
  - c. Seksi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Bimbingan Usaha Usaha Perkebunan;
  - c. Seksi Promosi dan Pemasaran.
7. UPT

Adapun uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu, adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perkebunan.

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan dan bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan dan bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan dan bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan dan bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang prasarana dan sarana perkebunan, produksi perkebunan dan bidang perlindungan perkebunan serta bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. pemantauan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan kewenangan;
- g. pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan Dinas Perkebunan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati baik lisan maupun tulisan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu didukung dengan sumberdaya manusia yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan dibantu dengan tenaga Non PNS atau pegawai tidak tetap (honorar). Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021, jumlah PNS dan Honorar sebanyak 58 orang terdiri atas PNS sebanyak 46 orang (62%), dan Non PNS/tenaga honorar sebanyak 28 orang (38%). Jumlah Non PNS/tenaga honorar adalah terdiri dari 11 orang tenaga administrasi kantor, 8 orang tenaga kebersihan kantor dan UPT, 7 orang tenaga keamanan kantor dan UPT, dan 2 orang supir. Keadaan sumberdaya manusia berdasarkan kualifikasi status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu  
berdasarkan status kepegawaian Tahun 2021

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	PNS	46 Orang
2.	Non PNS	28 Orang
<b>TOTAL</b>		<b>74 Orang</b>

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah PNS pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu secara keseluruhan hanya berjumlah 46 (empat puluh enam) orang, ini artinya jumlah PNS belum memenuhi kriteria Peta Jabatan yang lengkap sehingga perlu adanya penambahan PNS dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu.

Gambar 2.2  
Persentase jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten  
Bengkalis berdasarkan status kepegawaian Tahun 2021



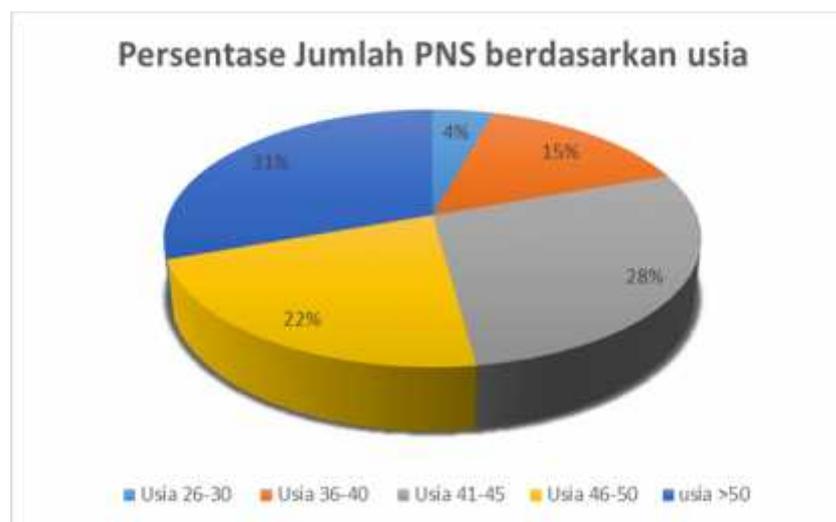
Berdasarkan usia jumlah PNS pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terdiri dari usia 26-30 sebanyak 2 orang, 36-40 tahun sebanyak 7 orang (12%), usia 41-45 tahun sebanyak 13 orang (36%), usia 46-50 tahun sebanyak 10 orang (12%) dan usia >50 tahun sebanyak 14 orang (40%). Melihat dari persentasenya, maka PNS Dinas Perkebunan dan Kabupaten Bengkalis didominasi usia 41-45 tahun dan usia >50 tahun. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2  
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis  
berdasarkan usia Tahun 2021

No.	Wilayah Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat	-	2	-	2	5	-	3	12
2	Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan	-	-	-	-	1	3	1	5
3	Bidang Produksi Perkebunan	-	-	-	-	1	2	2	5
4	Bidang Perlindungan Perkebunan	-	-	-	2	-	1	1	4

5	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	-	-	-	-	2	2	4
6	UPT	-	-	-	3	6	2	5	16
<b>TOTAL</b>		-	<b>2</b>	-	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>46</b>

Gambar 2.3  
Persentase jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu berdasarkan usia Tahun 2021



Berdasarkan pendidikan PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu terdiri dari doktoral sebanyak 1 orang, pasca sarjana sebanyak 7 orang, sarjana sebanyak 20 orang, diploma sebanyak 3 orang, SLTA sederajat sebanyak 15 orang dan SLTP sederajat 1 orang. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3  
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	-	5	1	4	2	-	12
2	Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan	-	-	-	3	2	-	5

3	Bidang Produksi Perkebunan	1	-	-	3	1	-	5
4	Bidang Perlindungan Perkebunan	-	1	1	1	-	1	4
5	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	-	-	3	1	-	4
6	UPT	-	8	1	6	1	-	16
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>46</b>

Gambar 2.4  
Persentase jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2021

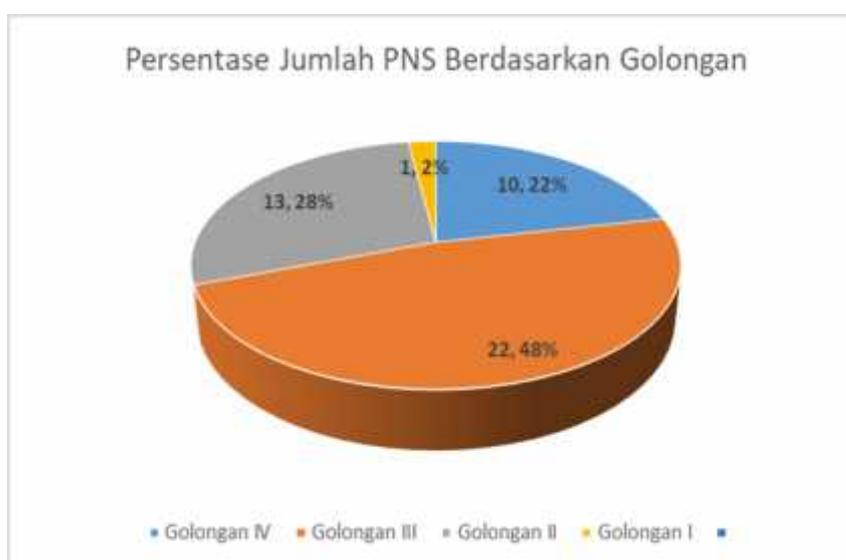


Berdasarkan golongan pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu terdiri dari Golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang, Golongan III sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Golongan II sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan Golongan I sebanyak 1 (satu) orang. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4  
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan Tahun 2021

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	5	5	2	<b>12</b>
2	Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan	-	-	2	3	<b>5</b>
3	Bidang Produksi Perkebunan	1	-	2	2	<b>5</b>
4	Bidang Perlindungan Perkebunan	-	1	3	-	<b>4</b>
5	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	-	-	1	3	<b>4</b>
6	UPT	-	7	9	-	<b>16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>46</b>

Gambar 2.5  
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan golongan Tahun 2021



Berdasarkan jabatan pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terdiri dari Eselon II sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III sebanyak 4 (empat) orang, Eselon IV sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, dan Non Eselon sebanyak 18 (delapan belas) orang. Secara

rinci jumlah pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini:

Tabel 2.5  
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan peta jabatan Tahun 2021

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	7	16	23
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	6	12	18
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>46</b>

Gambar 2.6  
Jumlah PNS Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis berdasarkan peta jabatan Tahun 2021



### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset dan Modal)

Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis memiliki bangunan kantor 2 (dua) lantai di Jalan Pertanian Bengkalis dan mempunyai

5 (lima) kantor Unit Pelaksana Teknis di 5 (lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Bengkalis, Bukit Batu, Mandau, Pinggir, dan Rupal.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dibiayai melalui APBD Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.6  
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1					
2					
3		<i>Belum dapat didata disebabkan belum adanya pemisahan aset setelah Dinas Pertanian menjadi 2 dinas yaitu Dinas Perkebunan dan Dinas</i>			
4		<i>Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan</i>			
5					

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus

pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

### 2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya pembantuan dibidang perkebunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terus menerus melakukan peningkatan pelayanan dibidang perkebunan.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7  
Pencapaian Target Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target (Ton/Ha/Tahun)					Realisasi Capaian Tahun (Ton/Ha/Tahun)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produktivitas tanaman Karet (K3=kadar karet kering)	0,777	0,778	0,779	0,780	0,781	0,936	0,840	0,858	0,887	0.908
2.	Produktivitas tanaman Kelapa (kopra = setara 4,5 butir kelapa)	0,914	0,915	0,916	0,917	0,918	0,899	0,645	0,703	0,873	0,893
3.	Produktivitas tanaman Kelapa Sawit (Setara Cpo)	2,667	2,678	2,679	2,680	2,681	1,375	2,020	1,945	2,310	2.305
4.	Produktivitas tanaman Sagu (tepung sagu kering)	1,533	1,534	1,535	1,536	1,537	1,536	1,389	1,390	1,594	1.885

Analisa pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut:

Realisasi capaian kinerja yang ditunjukkan pada tabel 2.7 di atas merupakan angka produktivitas dihitung dari nilai produksi dibagi nilai Tanaman Menghasilkan (TM) dikali 1000 (*Sumber: Angka Sementara Data Statistik Perkebunan Tahun 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis*).

Beberapa komoditas perkebunan tingkat capaian kerjanya belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu terjadinya alih jenis komoditas ke komoditas perkebunan lainnya, adanya alih fungsi lahan, kebakaran dan minimnya perluasan areal baru, serta pemeliharaan tanaman yang tidak tepat dosis, waktu dan sasaran. Misalnya pada komoditas kelapa setiap tahun cenderung tidak memenuhi target produktivitas yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan tanaman kelapa belum diusahakan dengan teknik budidaya yang benar dan tanaman sudah banyak dalam keadaan tua/tidak produktif namun masih diambil hasilnya. Sebagai upaya peningkatan produksi kelapa perlu adanya peremajaan yaitu mengganti tanaman tua dengan tanaman baru yang bersertifikat.

Begitupula dengan komoditas kelapa sawit cenderung tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi diduga karena beberapa faktor anatara lain pengaruh musim trek. Musim trek merupakan musim dimana hasil panen sawit menurun drastis atau bahkan tidak panen sama sekali. Selain itu bibit yang digunakan adalah bibit palsu (tidak baik) sehingga produksi rendah, serta pemeliharaan tanaman yang tidak intensif terutama pada pemupukan yang memerlukan biaya cukup besar.

Sebagai upaya peningkatan produksi tanaman kelapa sawit terutama pada saat musim trek, perlu dilakukan sosialisasi kepada petani kelapa sawit akan manfaat kemampuan kompos dalam menyimpan air lalu melepaskannya lagi saat kondisi disekitar tanaman kering sehingga tingkat kelembaban media tanam terjaga dengan baik. Selain itu memberikan pelatihan kepada petugas pekebun tentang penangkar benih yang bersertifikat serta melakukan sosialisasi kepada pekebun tentang bibit palsu kelapa sawit, memberikan pupuk bersubsidi kepada pekebun serta melakukan peremajaan terhadap tanaman kelapa

sawit tua. Salah satunya adalah dengan mendukung dan melaksanakan Program Pemerintah yaitu Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun. Pencapaian target dengan realisasi kinerja selama 5 (tahun) dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Gambar 2.7 Capaian Target dan Realisasi Tanaman Karet



Gambar 2.8 Capaian Target dan Realisasi Tanaman Kelapa



Gambar 2.9 Capaian Target dan Realisasi Tanaman Kelapa Sawit



Gambar 2.10 Capaian Target dan Realisasi Tanaman Sagu



### 2.3.2 Capaian Kinerja Anggaran

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja anggaran didasarkan pada alokasi dan realisasi anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.

Tabel 2.8  
Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten  
Bengkalis  
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2016	2,667.877.300,00	1.956.257.600,00	73,33
2	2017	1.068.345.000,00	785.760.875,00	73,55
3	2018	667.508.000,00	517.989.747,00	77,60
4	2019	978.646.000,00	820.900.159,00	83,88
5	2020	891.187.000,00	676.572.702,00	75,92
	<b>Jumlah</b>	<b>6.273.563.300,00</b>	<b>4.757.481.083,00</b>	<b>76,86</b>

Berdasarkan tabel 2.8 di atas dapat digambarkan nilai capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2020 terhadap anggaran adalah sebesar Rp 4.757.481.083,00 dari Rp 6.273.563.300,00 atau sebesar 76,86%. Ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah cukup baik, namun perlu dioptimalkan lagi perencanaan kegiatan terhadap anggaran sehingga penyerapan anggaran bisa lebih baik.

Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terhadap program Tahun 2016-2020.

Tabel 2.9  
Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten  
Bengkalis Terhadap Program Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran Tahun (Rp x 1000)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp x 1000)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	3.074	0	0	140.455	80.670	3.074	0	0	111.285	64.828,900
2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	708.118	707.959	329.542	100.820	112.016	335.056,2	556.975,775	267.407	93.519,5	100.437,665
3	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.956.685,3	360.386	337.966	737.371	698.501	1.618.127,4	228.785,1	250.582,747	616.095,659	511.306,137
	Jumlah	2.667.877,3	1.068.345	667.508	978.646	891.187	1.956.257,6	785.760,875	517.989,747	820.900,159	676.572,702

Dari tabel 2.9 di atas dapat dilihat bahwa anggaran pada program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan lebih besar

dibandingkan dengan anggaran pada program lainnya. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indikator sasaran, outcome program, maupun output kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun faktor internal **kekuatan (*strengths*)** Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang tugas kedinasan yang memadai.
- 3) Tersedianya SDM dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan;
- 4) Tersedianya peraturan per undang-undangan, norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, dan kebijakan;
- 5) Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi);

- 6) Tersedianya jenis komoditas perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan industri dan peningkatan lapangan kerja.

Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis juga memiliki beberapa **kelemahan (*weakness*)** diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Seringnya terjadinya perubahan tentang SOTK.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang tugas kedinasan.
- 3) Kuantitas dan kualitas aparatur yang belum memadai dan sesuai dengan standar kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan pembangunan perkebunan.
- 4) Koordinasi antar lembaga dan antar stakeholder belum optimal sehingga program-program pembangunan perkebunan belum terintegrasi dengan program-program sektor lainnya.

Berdasarkan analisis hal-hal tersebut di atas, maka tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

**A. Peluang (*Opportunity*)**

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan.
- 2) Adanya komitmen pimpinan dalam pembangunan Perkebunan berkelanjutan.
- 3) Tersedianya SDA, SDM dan SDB dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan.
- 4) Pengembangan tanaman perkebunan terbuka luas.
- 5) Posisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional maupun internasional.
- 6) Tersedianya mitra dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan.

- 7) Berkembangnya teknologi PHT yang ramah lingkungan.
- 8) Komitmen pemerintah dalam mitigasi danantisipasi perubahan iklim.
- 9) Iklim investasi produk perkebunan yang kondusif.

**B. Tantangan (*Threat*)**

- 1) Terbatasnya SDM pekebun dan semakin tingginya alih fungsi lahan.
- 2) Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan masih rendah.
- 3) Kurangnya infrastuktur, sarana dan prasarana produksi perkebunan.
- 4) Masih rendahnya akses permodalan bagi petani pekebun.
- 5) Masih lemahnya kelembagaan pekebun dalam menjalin kerjasama kemitraan.
- 6) Masih adanya serangan OPT perkebunan.
- 7) Anomali Iklim, isu lingkungan dan globalisasi.
- 8) Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal.
- 9) Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal.

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BENGKALIS

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau prioritas program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa mendatang. Isu-isu dapat juga diartikan sebagai persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu mendatang. Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu adalah

"Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta kesejahteraan petani pekebun", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan pembangunan perkebunan. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Masih terbatasnya prasarana dan sarana perkebunan
- 2) Masih rendahnya produksi tanaman perkebunan
- 3) Masih rendahnya produktivitas tanaman perkebunan
- 4) Belum optimalnya perlindungan terhadap perkebunan
- 5) Masih rendahnya kualitas hasil perkebunan
- 6) Terbatasnya pemasaran hasil produksi perkebunan

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis lebih kepada permasalahan eksternal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1.  
Kerangka Permasalahan Pelayanan  
Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis



Berdasarkan Permasalahan-permasalahan dan isu strategi tersebut maka perlu dilakukan strategi dan arah kebijakan. Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1  
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis

No	Aspek	Permasalahan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Permasalahan dalam Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan	Masih terbatasnya prasarana dan sarana perkebunan 1. Minimnya aksesibilitas lahan yang layak. 2. Minimnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dan petugas dalam menerapkan teknologi budidaya tanaman perkebunan. 3. Masih banyaknya lahan terlantar yang masih belum diusahakan. 4. Belum adanya rekomendasi pemupukan yang spesifikasi lokasi 5. Masih banyaknya penggunaan bibit tanaman palsu/tidak bersertifikat. 6. Masih lemahnya kemampuan petani dari akses permodalan dalam mengusahakan hasil produksi.	Peningkatan prasarana dan sarana perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memetakan kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan</li> <li>➤ Membangun infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan</li> <li>➤ Melakukan pembinaan dan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat</li> <li>➤ Memfasilitasi penyediaan alat dan mesin pengolah hasil perkebunan</li> <li>➤ Memfasilitasi akses pembiayaan usaha perkebunan</li> </ul>
2	Permasalahan dalam Bidang Produksi Perkebunan	Masih rendahnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan 1. Minimnya penggunaan sarana produksi yang tepat waktu, dosis dan cara. 2. Banyaknya tanaman tua rusak yang masih dimanfaatkan masyarakat petani pekebun. 3. Diversifikasi tanaman perkebunan yang belum optimal terlihat dari banyaknya lahan tanaman masih monokultur. 4. Minimnya pengetahuan dan keterampilan petani dan aparatur dalam teknologi peningkatan nilai tambah hasil produksi.	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengembangan komoditas perkebunan dengan sistem budidaya yang baik melalui peremajaan, ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi.</li> <li>➤ Menerapkan inovasi teknologi perkebunan</li> <li>➤ Melakukan pembinaan usaha perkebunan dan penyediaan benih bermutu</li> <li>➤ Penguatan data base perkebunan</li> </ul>
3	Permasalahan dalam Bidang Perlindungan Perkebunan	Belum optimalnya perlindungan terhadap perkebunan 1. Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan pekebun dalam pengendalian hama terpadu. 2. Masih adanya perkebunan yang berada tidak sesuai di kawasan peruntukannya 3. Masih adanya praktek pembukaan lahan dengan cara membakar.	Peningkatan perlindungan terhadap usaha perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.</li> <li>➤ Penguatan brigade pengendalian kebakaran lahan kebun kabupaten</li> <li>➤ Penguatan KTPA</li> <li>➤ Penguatan koordinasi dengan perusahaan perkebunan dan stakeholder terkait lainnya</li> <li>➤ Peningkatan pembinaan dan pengawasan terkait kesiapan perusahaan dalam penanganan kebakaran lahan dan kebun</li> </ul>

No	Aspek	Permasalahan	Strategi	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Masih rendahnya kemampuan pekebun dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun.</li> <li>5. Masih banyaknya perusahaan perkebunan pemilik HGU yang belum melaksanakan kewajiban 20% memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> <li>6. Masih banyaknya perusahaan pengolah hasil perkebunan yang belum memenuhi kewajiban minimal 20% kebutuhan bahan baku berasal dari kebun dikelola sendiri.</li> <li>7. Masih banyaknya perusahaan pengolah perkebunan yang belum melakukan perjanjian kerjasama kemitraan pengelolaan berkelanjutan dalam pemenuhan bahan baku industry.</li> <li>8. Masih banyaknya perusahaan perkebunan yang belum memiliki kelas usaha perkebunan dan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)</li> <li>9. Masih adanya konflik kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat.</li> </ol>		
4	Permasalahan dalam Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya industri hilir pengolahan hasil komoditi perkebunan</li> <li>2. Kurangnya infrastruktur yang mendukung berkembangnya industri hilir</li> <li>3. Masih lemahnya kelembagaan pekebun</li> <li>4. Terbatasnya data hasil produksi dan pemasaran hasil perkebunan rakyat yang valid dan akurat</li> <li>5. Masih lemahnya ketaatan perusahaan dalam melaporkan hasil produksi perkebunan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas hasil perkebunan</li> <li>2. Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan</li> <li>3. Penguatan kelembagaan pekebun</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan pembinaan mutu produk perkebunan</li> <li>➤ Pengembangan unit usaha pengolahan hasil perkebunan</li> <li>➤ Pengembangan pelayanan informasi pasar</li> <li>➤ Memfasilitasi promosi produk perkebunan</li> <li>➤ Melaksanakan pelatihan petani pekebun dan aparatur perkebunan</li> <li>➤ Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok tani</li> <li>➤ Menyiapkan roadmap industri pengolahan keragaman hasil perkebunan rakyat</li> <li>➤ Menyiapkan prasarana, sarana dan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perkebunan</li> <li>➤ Melakukan keserasian pemasaran hasil-hasil olahan perkebunan</li> <li>➤ Peningkatan kerjasama kemitraan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan</li> <li>➤ Penguatan data produksi pengolahan hasil tanaman perkebunan</li> </ul>

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2021-2025 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkulu 2005-2026, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkulu, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024.

Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkulu tahun 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya Kabupaten Bengkulu yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera”***

dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bermartabat, memiliki kebanggaan sebagai masyarakat yang bermartabat dengan terbentuknya karakter masyarakat berpengetahuan dan memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan landasan keagamaan dan kebudayaan.
- 2) Maju, telah terpenuhi semua kebutuhan baik pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan teknologi, yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang kompetitif serta masyarakat yang lebih mandiri yang didukung oleh birokrasi pemerintah yang profesional dan berwibawa;
- 3) Sejahtera, telah terpenuhi kebutuhan dasar sebagai wujud dari pembangunan yang adil, merata dan menyentuh semua aspek kehidupan yang ditandai dengan tingkat pendapatan yang cukup, rendahnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat kriminal serta tingkat kesehatan dan pendidikan yang sangat baik.

#### 3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Bengkulu 2021-2026 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.
- 2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
- 3) Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Secara geografis dan demografi karakteristik wilayah Kabupaten Bengkulu terbagi menjadi empat kawasan yang memiliki kekhususan dan keunikan tersendiri, sehingga dalam pendekatan spasial (Keruangan) pelaksanaan program pembangunan dibagi menjadi 4 (empat) klaster pembangunan kawasan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bengkulu dan Kecamatan Bantan sebagai Kawasan Pemerintahan dan Pendidikan.
2. Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai Kawasan Pertanian dan Perkebunan.
3. Kecamatan Rupa dan Rupa Utara sebagai Kawasan pariwisata unggulan.
4. Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir dan Talang Muandau sebagai Kawasan Industri dan Perdagangan.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2021–2026, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu sesuai tugas pokok dan fungsinya fokus pada Misi 1 yaitu Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu, yaitu:

- a. Diperlukannya pengelolaan pembangunan dibidang perkebunan secara baik dan berkelanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang tersedia dan melekat teknologi informasi.
- b. Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah Kabupaten Bengkulu yang bernaung, maju dan sejahtera. Bila pengelolaan pembangunan dibidang

perkebunan dapat dilakukan secara baik dan berkelanjutan untuk mendukung visi Bupati Bengkalis, yaitu dengan memfokuskan pada peningkatan keahlian petani pekebun melalui pelatihan, mekanisasi perkebunan, dan peningkatan teknologi hasil perkebunan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani pekebun.

- c. Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani merupakan suplemen pendorong/tambahan semangat/momentum bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam rangka optimalisasi pengelolaan pembangunan dibidang perkebunan.

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Bupati Bengkalis yang terkait dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkulu yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera								
Misi ke-1	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian								
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Data Awal	Data Target lima Tahun mendatang					Kondisi Akhir (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta kesejahteraan petani pekebun	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	19,142	19,142	19,342	19,542	19,742	19,942	20,142
		a. Karet (K3 = Kadar Karet Kering)	4,062	4,062	4,112	4,162	4,212	4,262	4,312
		b. Kelapa (Kopra setara = 4,5 butir kelapa)	262,292	262,292	262,500	263,000	263,500	264,000	265,000
		c. Kelapa sawit (setara Cpo)	3,189	3,189	3,489	3,789	4,089	4,389	4,689
	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton)	0.908	0.908	0.928	0.948	0.968	0.988	1.008
		a. Karet (K3 = Kadar Karet Kering)	0.893	0.893	0.913	0.933	0.953	0.973	0.993
		b. Kelapa (Kopra setara = 4,5 butir kelapa)	2.305	2.305	2.307	2.309	2.311	2.313	2.315
		c. Kelapa sawit (setara Cpo)	1.886	1.886	1.888	1.890	1.892	1.894	1.896
		d. Sagu (Tepung sagu kering)	101	101	102	103	104	105	106
		a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	62.67	62.67	62.68	62.69	62.70	62.71	62.72
Meningkatnya Kapasitas kelembagaan	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga	a. Predikat Evaluasi SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		b. Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Provinsi/ Kabupaten/Kota

#### 3.3.1. Renstra Kementerian Pertanian

Visi : Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

- 1) Mewujudkan ketahanan pangan;
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Adapun Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan;
- 2) Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
- 3) Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sedangkan Sasaran Strategis Kementerian Pertanian yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
- 2) Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional;
- 3) Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
- 4) Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian;
- 5) Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan;
- 6) Terkendalinya penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan;
- 7) Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional;
- 8) Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- 9) Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

### 3.3.2 Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 – 2024 yang merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahun dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Tujuan Jangka Menengah Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah:

- 1) Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pendapatan petani perkebunan

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah:

- 1) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan dan peningkatan kompetensi SDM petani;

### 3.3.3. Telaahan terhadap Renstra Kabupaten

Melihat misi Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 di atas, maka SKPD Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis terfokus pada misi pertama yaitu "Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian".

Kaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

- Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju Dan Sejahtera  
Misi : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.

Tabel 3.3  
Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RPJMD terkait tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu

VISI		TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA		
MISI	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomian daerah	Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan menjamin keberkangsungan usaha masyarakat	Pemberian Stimulus ekonomi dan penyediaan sarana prasarana pendukung bagi petani dan nelayan	
		Menyediakan lahan pertanian dalam kawasan hutan	Fasilitasi lahan pertanian pada kawasan hutan	

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) dan Kajian Lingkungan Hidup

Pembangunan Kabupaten Bengkulu mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2024 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Bengkulu meliputi:

- 1) Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi;
- 2) Pengembangan sistem perkotaan untuk mewujudkan keterpaduan wilayah daratan dengan wilayah lautan dalam konstelasi regional, nasional, dan internasional (lintas batas negara);
- 3) Pengembangan prasarana dan sarana dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan interaksi antar wilayah;
- 4) Pengembangan wilayah berwawasan lingkungan, budaya dan mitigasi bencana;
- 5) Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dan pelestarian lingkungan hidup; dan
- 6) Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi sebagaimana dimaksud pada kebijakan penataan ruang di atas ditempuh strategi melalui:

- 1) mengembangkan kawasan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- 2) menetapkan dan mengembangkan lahan untuk pertanian pangan berkelanjutan;
- 3) mengembangkan pusat agrobisnis untuk mendukung dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten;
- 4) mengembangkan kawasan produksi perikanan melalui konsep minapolitan;
- 5) mengembangkan pengelolaan hasil hutan;
- 6) mengembangkan kawasan pariwisata;
- 7) mengembangkan industri berbasis perkebunan dan perikanan; dan
- 8) meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan kawasan migas yang habis produksi menjadi kawasan permukiman yang produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten berada pada Kebijakan (1) Pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi sumber daya alam, penciptaan nilai tambah dan keunggulan lokasi, dan Strategi 1, 2, dan 3 yaitu mengembangkan kawasan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; mengembangkan pusat agrobisnis untuk mendukung dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten; mengembangkan industri berbasis perkebunan dan perikanan.

Adapun Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang yakni perwujudan kawasan perkebunan, melalui:

- 1) pengembangan wilayah agribisnis dan agroindustri;
- 2) pengembangan komoditi perkebunan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan;
- 3) penataan irigasi/kanal pada areal perkebunan lahan gambut; dan
- 4) Pengembangan sumber daya manusia dibidang perkebunan.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu

strategis dalam pengelolaan dibidang perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan prasarana dan sarana perkebunan;
- 2) Meningkatkan produksi tanaman perkebunan;
- 3) Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan;
- 4) Diversifikasi Tanaman Perkebunan;
- 5) Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim;
- 6) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan;
- 7) Fasilitasi penanganan konflik usaha perkebunan;
- 8) Meningkatkan mutu hasil perkebunan;
- 9) Meningkatkan kapasitas kelembagaan;
- 10) Meningkatkan kerjasama kemitraan.

Tabel 3.3  
Perumusan Isu Strategis pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu

No.	Aspek Permasalahan Pelayanan PD	Permasalahan Strategis	Telaahan Renstra	Telaahan Visi, Misi, dan Program KD dan Wakil KD Terpilih	Telaahan RTRW/KLHS	Isu-isu Strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan	Masih terbatasnya prasarana dan sarana perkebunan	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta kesejahteraan petani pekebun	Visi : terwujudnya Kabupaten Bengkulu yang bermartuah, maju dan sejahtera  Misi 1 : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian  Program Kerja : Stimulus ekonomi bagi pekerja sektor informal seperti buruh, petani, peternak, nelayan dan lain-lain, peningkatan lapangan pekerjaan dan penerapan teknologi serta inovasi bidang perekonomian		Meningkatkan prasarana dan sarana perkebunan
2.	Permasalahan dalam Bidang Produksi Perkebunan	- Masih rendahnya produksi tanaman perkebunan - Masih rendahnya produktivitas hasil tanaman perkebunan				1. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan. 2. Meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan. 3. Diversifikasi Tanaman Perkebunan
3.	Permasalahan dalam Bidang Perlindungan Perkebunan	Belum optimalnya perlindungan terhadap perkebunan				1. Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan 3. Fasilitasi penanganan konflik usaha perkebunan
4.	Permasalahan dalam Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	- Masih rendahnya kualitas hasil perkebunan - Terbatasnya pemasaran hasil produksi perkebunan				4. Meningkatkan mutu hasil perkebunan 5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan 6. Meningkatkan kerjasama kemitraan

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu

#### 4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan dibidang perkebunan dengan tujuan yaitu "Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta kesejahteraan petani pekebun"

#### 4.1.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran jangka menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;
- 2) Meningkatnya kesejahteraan pekebun;
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 seperti Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026

Visi RPJMD	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera											
Misi ke-1	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian											
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Ext Tahun 2020	Target Kinerja pada Tahun ke-						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	
Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta kesejahteraan petani pekebun	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	19,142	19,142	19,342	19,542	19,742	19,942	20,142	20,142	
		a. Karet (K3 = Kadar Karet Kering)										
		b. Kelapa (Kopra setara = 4,5 butir kelapa)	Ton	4,062	4,062	4,112	4,162	4,212	4,262	4,312	4,312	
		c. Kelapa sawit (setara Cpo)	Ton	262,292	262,292	262,500	263,000	263,500	264,000	265,000	265,000	
	d. Sagu (Tepung sagu kering)	Ton	3,189	3,189	3,489	3,789	4,089	4,389	4,689	4,689		
	Produktivitas Tanaman Perkebunan		Ton/Ha/Tahun	0.908	0.908	0.928	0.948	0.968	0.988	1.008	1.008	
		a. Karet (K3 = Kadar Karet Kering)										
		b. Kelapa (Kopra setara = 4,5 butir kelapa)	Ton/Ha/Tahun	0.893	0.893	0.913	0.933	0.953	0.973	0.993	0.993	
		c. Kelapa sawit (setara Cpo)	Ton/Ha/Tahun	2.305	2.305	2.307	2.309	2.311	2.313	2.315	2.315	
	d. Sagu (Tepung sagu kering)	Ton/Ha/Tahun	1.886	1.886	1.888	1.890	1.892	1.894	1.896	1.896		
Meningkatnya kesejahteraan pekebun	a. Nilai Tukar Petani (NTPR)			101	102	103	104	105	106	106		
	b. Persentase pekebun dengan penghasilan minimal setara UMR			62.67	62.68	62.69	62.70	62.71	62.72	62.72		
Meningkatnya Kapasitas kelembagaan	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga	a. Predikat Evaluasi SAKIP			B	B	BB	BB	BB	BB	BB	
		b. Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti (%)			100	100	100	100	100	100	100	

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Perkebunan tahun 2021-2026 berdasarkan tantangan dan peluang serta permasalahan dari internal baik kekuatan dan kelemahan pembangunan Perkebunan perlu dilakukan dengan

menggunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

A. Kekuatan (Strength)

- 1) Mempunyai SOTK yang sudah jelas.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang tugas kedinasan yang memadai.
- 3) Tersedianya SDM dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan.
- 4) Tersedianya peraturan per undang-undangan, norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, dan kebijakan.
- 5) Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi).
- 6) Tersedianya jenis komoditas perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan industri dan peningkatan lapangan kerja.

B. Kelemahan (Weakness)

- 1) Kuantitas dan kualitas aparatur yang belum memadai dan sesuai dengan standar kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan pembangunan perkebunan.
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang tugas kedinasan.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana perkebunan.
- 4) Koordinasi antar lembaga dan antar stakeholder belum optimal sehingga program-program pembangunan perkebunan belum terintegrasi dengan program-program sektor lainnya.
- 5) Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal.
- 6) Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil produksi perkebunan yang belum optimal.

C. Peluang (Opportunity)

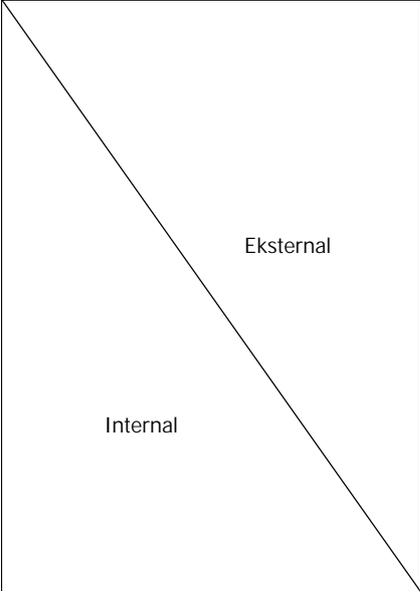
- 1) Adanya komitmen pimpinan dalam pembangunan Perkebunan berkelanjutan.
- 2) Tersedianya SDA, SDM dan SDB dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan.
- 3) Pengembangan tanaman perkebunan terbuka luas.

- 4) Posisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional maupun internasional.
- 5) Tersedianya mitra dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan.
- 6) Berkembangnya teknologi PHT yang ramah lingkungan.
- 7) Komitmen pemerintah dalam mitigasi dan antisipasi perubahan iklim.
- 8) Iklim investasi produk perkebunan yang kondusif.

#### D. Tantangan (Threat)

- 1) Terbatasnya SDM pekebun dan semakin tingginya alih fungsi lahan.
- 2) Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan masih rendah.
- 3) Kurangnya infrastuktur, sarana dan prasarana produksi.
- 4) Masih rendahnya akses permodalan bagi petani pekebun.
- 5) Masih lemahnya kelembagaan pekebun dalam menjalin kerjasama kemitraan.
- 6) Masih adanya serangan OPT perkebunan.
- 7) Anomali Iklim, isu lingkungan dan globalisasi.
- 8) Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal.

Tabel 5.1  
Analisis SWOT Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

	<p>Peluang (opportunities):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen pimpinan dalam pembangunan Perkebunan berkelanjutan.</li> <li>2. Tersedianya SDA, SDM dan SDB dalam pengembangan perkebunan berkelanjutan.</li> <li>3. Pengembangan tanaman perkebunan terbuka luas.</li> <li>4. Posisi wilayah Kabupaten Bengkalis yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional maupun internasional.</li> <li>5. Tersedianya mitra dalam pengelolaan perkebunan berkelanjutan.</li> <li>6. Berkembangnya teknologi PHT yang ramah lingkungan.</li> <li>7. Komitmen pemerintah dalam mitigasi dan antisipasi perubahan iklim.</li> <li>8. Iklim investasi produk perkebunan yang kondusif.</li> </ol>	<p>Tantangan (threats):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbatasnya SDM pekebun dan semakin tingginya alih fungsi lahan.</li> <li>2) Produksi dan produktivitas tanaman perkebunan masih rendah.</li> <li>3) Kurangnya infrastuktur, sarana dan prasarana produksi.</li> <li>4) Masih rendahnya akses permodalan bagi petani pekebun.</li> <li>5) Masih lemahnya kelembagaan pekebun dalam menjalin kerjasama kemitraan.</li> <li>6) Masih adanya serangan OPT perkebunan.</li> <li>7) Anomali Iklim, isu lingkungan dan globalisasi.</li> <li>8) Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal.</li> </ol>
<p>Kekuatan (strenghts):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempunyai SOTK yang sudah jelas.</li> <li>2) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang tugas kedinasan yang memadai.</li> <li>3) Tersedianya SDM dalam</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi (SO):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan unit kerja/UPT untuk mendukung optimalisasi pengembangan perkebunan</li> <li>2. Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman perkebunan</li> </ol>	<p>Alternatif Strategi (ST):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi perkebunan dengan memanfaatkan SDM, standar teknis dan teknologi tepat guna.</li> </ol>

<p>pengembangan perkebunan berkelanjutan.</p> <p>4) Tersedianya peraturan per undang-undangan, norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, dan kebijakan.</p> <p>5) Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi).</p> <p>6) Tersedianya jenis komoditas perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan industri dan peningkatan lapangan kerja.</p>	<p>3. Peningkatan kemampuan SDM dalam penggunaan benih/bibit unggul</p> <p>4. pemanfaatan SDA, SDM, SDB dalam pengembangan agribisnis perkebunan.</p> <p>5. Pemanfaatan potensi sumberdaya perkebunan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>7. Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan perkebunan.</p> <p>8. Peningkatan penerapan teknologi untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan luar negeri</p> <p>9.</p>	<p>2. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan SDA melalui penerapan teknologi ramah lingkungan</p> <p>4. Peningkatan kesejahteraan petani dengan memperkuat SDM dan kelembagaan petani</p>
<p>Kelemahan (weakness):</p> <p>1) Kuantitas dan kualitas aparatur yang belum memadai dan sesuai dengan standar kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pelayanan pembangunan perkebunan.</p> <p>2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang tugas kedinasan.</p> <p>3) Terbatasnya sarana dan prasarana perkebunan.</p> <p>4) Koordinasi antar lembaga dan antar stakeholder belum optimal sehingga program-program pembangunan perkebunan belum terintegrasi dengan program-program sektor lainnya.</p> <p>5) Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal.</p> <p>6) Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil produksi perkebunan yang belum optimal.</p>	<p>Alternatif Strategi (WO):</p> <p>1. Pemanfaatan potensi sumberdaya perkebunan dengan penanganan budidaya tanaman yang sesuai standar.</p> <p>2. Peningkatan penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan.</p> <p>3. Peningkatan nilai tambah dan akses terhadap informasi pasar.</p> <p>4. Peningkatan pengendalian OPT, gangguan usaha dan kebakaran lahan</p> <p>5. Peningkatan penggunaan bibit unggul sesuai standar dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait penangkar benih</p>	<p>Alternatif Strategi (WT):</p> <p>1. dan kehumanansesuai standar.</p> <p>2. Peningkatan SDM dan SDA perkebunan</p> <p>3. Optimalisasi potensi lahan dan pengembangan tanaman perkebunan produksi hilir.</p> <p>4. Peningkatan penyediaan infrastruktur, prasarana &amp; sarana perkebunan.</p> <p>5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mengantisipasi isu lingkungan hidup dan globalisasi</p>

Dari hasil analisis SWOT di atas maka ditetapkanlah strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pasarana dan sarana perkebunan
- 2) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
- 3) Peningkatan perlindungan terhadap usaha perkebunan
- 4) Peningkatan kualitas hasil perkebunan
- 5) Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan
- 6) Penguatan kelembagaan pekebun

Arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- 1) Memetakan kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan
- 2) Membangun infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan

- 3) Melakukan pembinaan dan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat
- 4) Memfasilitasi penyediaan alat dan mesin pengolah hasil perkebunan
- 5) Memfasilitasi akses pembiayaan usaha perkebunan
- 6) Pengembangan komoditas perkebunan dengan sistem budidaya yang baik melalui peremajaan, ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi.
- 7) Menerapkan inovasi teknologi perkebunan
- 8) Melakukan pembinaan usaha perkebunan dan penyediaan benih bermutu
- 9) Penguatan data base perkebunan
- 10) Fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
- 11) Penguatan brigade pengendalian kebakaran lahan kebun kabupaten
- 12) Penguatan KTPA
- 13) Penguatan koordinasi dengan perusahaan perkebunan dan stakeholder terkait lainnya
- 14) Peningkatan pembinaan dan pengawasan terkait kesiapan perusahaan dalam penanganan kebakaran lahan dan kebun
- 15) Melaksanakan pembinaan mutu produk perkebunan
- 16) Pengembangan unit usaha pengolahan hasil perkebunan
- 17) Pengembangan pelayanan informasi pasar
- 18) Memfasilitasi promosi produk perkebunan
- 19) Melaksanakan pelatihan petani pekebun dan aparatur perkebunan
- 20) Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok tani
- 21) Menyiapkan roadmap industri pengolahan keragaman hasil perkebunan rakyat
- 22) Menyiapkan prasarana, sarana dan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perkebunan
- 23) Melakukan keserasian pemasaran hasil-hasil olahan perkebunan
- 24) Peningkatan kerjasama kemitraan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan
- 25) Penguatan data produksi pengolahan hasil tanaman perkebunan
- 26) Menyiapkan prasarana dan sarana administrasi kantor dan aparatur;
- 27) Melaksanakan pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu;
- 28) Meningkatkan kualitas aparatur teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi.

Selengkapnya tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Pembangunan Perkebunan Jangka Menengah diuraikan pada Tabel 5.1 di bawah ini:

**Tabel 5.1**  
**Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Sesuai Dengan Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera				
Misi : Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan serta kesejahteraan petani pekebun	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan prasarana dan sarana perkebunan</li> <li>2. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan</li> <li>3. Peningkatan perlindungan terhadap usaha perkebunan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memetakan kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan</li> <li>➤ Membangun infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan</li> <li>➤ Melakukan pembinaan dan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat</li> <li>➤ Memfasilitasi penyediaan alat dan mesin pengolah hasil perkebunan</li> <li>➤ Memfasilitasi akses pembiayaan usaha perkebunan</li> <li>➤ Pengembangan komoditas perkebunan dengan sistem budidaya yang baik melalui peremajaan, ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi.</li> <li>➤ Menerapkan inovasi teknologi perkebunan</li> <li>➤ Melakukan pembinaan usaha perkebunan dan penyediaan benih bermutu</li> <li>➤ Penguatan data base perkebunan</li> <li>➤ Fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.</li> <li>➤ Penguatan brigade pengendalian kebakaran lahan kebun kabupaten</li> <li>➤ Penguatan KTPA</li> <li>➤ Penguatan koordinasi dengan perusahaan perkebunan dan stakeholder terkait lainnya</li> <li>➤ Peningkatan pembinaan dan pengawasan terkait kesiapan perusahaan dalam penanganan kebakaran lahan dan kebun</li> </ul>
2		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas hasil perkebunan</li> <li>2. Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan</li> <li>3. Penguatan kelembagaan pekebun</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan pembinaan mutu produk perkebunan</li> <li>➤ Pengembangan unit usaha pengolahan hasil perkebunan</li> <li>➤ Pengembangan pelayanan informasi pasar</li> <li>➤ Memfasilitasi promosi produk perkebunan</li> <li>➤ Melaksanakan pelatihan petani pekebun dan aparatur perkebunan</li> <li>➤ Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok tani</li> <li>➤ Menyiapkan roadmap industri pengolahan keragaman hasil perkebunan rakyat</li> <li>➤ Menyiapkan prasarana, sarana dan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perkebunan</li> <li>➤ Melakukan keserasian pemasaran hasil-hasil olahan perkebunan</li> <li>➤ Peningkatan kerjasama kemitraan antara pekebun dengan perusahaan perkebunan</li> <li>➤ Penguatan data produksi pengolahan hasil tanaman perkebunan</li> </ul>

## **BAB VI**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan, terdiri atas 8 (delapan) kegiatan:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis baik berupa Renstra, Renja, RKA, DPA, LKPJ, LPPD, Laporan capaian kinerja dan laporan keterangan pertanggungjawaban, serta laporan monitoring dan evaluasi kegiatan selama 1 tahun sekaligus penertiban asset dan Barang Milik Daerah baik distribusi maupun pendataan.

2) Administrasi Keuangan Dan Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan penyediaan anggaran gaji dan tunjangan untuk ASN.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik daerah secara berkesinambungan dan tepat guna.

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program ini merupakan program penunjang pembangunan bidang perkebunan yaitu dalam rangka penyediaan dan pengembangan sarana perkebunan baik itu berupa bibit tanaman, pupuk dan sarana perkebunan lainnya. Pada program ini Dinas Perkebunan mencantolkan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - 2) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program ini merupakan program penunjang pembangunan bidang perkebunan yaitu dalam rangka penyediaan dan pengembangan prasarana perkebunan baik itu berupa kebutuhan data dan informasi, jalan produksi, pintu air, sekat kanal dan tali air, mesin dan peralatan pengolah hasil perkebunan dan prasarana perkebunan lainnya. Pada program ini Dinas Perkebunan mencantolkan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengembangan Prasarana Pertanian
  - 2) Pembangunan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Program ini merupakan program penunjang pembangunan bidang perkebunan yaitu dalam rangka pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan seperti kebakaran lahan dan kebun, gangguan usaha perkebunan dan pengendalian terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Pada program ini Dinas Perkebunan mencantolkan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
- Program ini merupakan program penunjang pembangunan bidang perkebunan yaitu dalam rangka pengawasan, pembinaan dan penilaian usaha perkebunan. Pada program ini Dinas Perkebunan mencantolkan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini merupakan program penunjang pembangunan bidang perkebunan yaitu dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan pekebun dan usaha perkebunan. Pada program ini Dinas Perkebunan mencantolkan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Tabel 6.1  
Rencana Program dan Kegiatan  
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Terwujudnya peningkatan produk dan produktivitas tanaman perkebunan serta kesejahteraan pekebun	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan serta kesejahteraan pekebun		3.27.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terlaksananya pemenuhan penunjang urusan pemerintahan Dinas Perkebunan	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Dinas Perkebunan		100%	11,700,160,943.00	100%	21,265,032,618.00	100%	21,611,808,074.00	100%	21,888,372,750.60	100%	22,168,824,797.72	100%	22,875,128,271.00	100%	22,875,128,271.00
			3.27.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen	297,570,000.00	6 Dokumen	413,636,000.00	6 Dokumen	500,000,000.00	6 Dokumen	600,000,000.00	6 Dokumen	720,000,000.00	6 Dokumen	786,000,000.00	6 Dokumen	786,000,000.00
			3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun perangkat daerah		3 Dokumen	144,100,000.00	5 Dokumen	168,740,000.00	5 Dokumen	200,000,000.00	5 Dokumen	240,000,000.00	5 Dokumen	288,000,000.00	5 Dokumen	302,400,000.00	5 Dokumen	302,400,000.00
			3.27.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun		1 Laporan	153,470,000.00	1 Laporan	244,896,000.00	1 Laporan	300,000,000.00	1 Laporan	360,000,000.00	1 Laporan	432,000,000.00	1 Laporan	453,600,000.00	1 Laporan	453,600,000.00
			3.27.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pengelolaan keuangan perangkat daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		55 Orang	7,531,144,743.00	60 Orang	9,514,052,943.00	60 Orang	9,401,620,048.00	60 Orang	11,281,944,057.60	60 Orang	13,538,332,869.12	60 Orang	14,215,249,512.58	60 Orang	14,215,249,512.58
			3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan		55 Orang	7,531,144,743.00	60 Orang	9,514,052,943.00	60 Orang	9,401,620,048.00	60 Orang	11,281,944,057.60	60 Orang	13,538,332,869.12	60 Orang	14,215,249,512.58	60 Orang	14,215,249,512.58
			3.27.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah		1 Laporan	150,400,000.00	1 Laporan	172,800,000.00	1 Laporan	372,800,000.00	1 Laporan	447,360,000.00	1 Laporan	536,832,000.00	1 Laporan	563,673,600.00	1 Laporan	563,673,600.00
			3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	100,000,000.00	1 Dokumen	120,000,000.00	1 Dokumen	144,000,000.00	1 Dokumen	151,200,000.00	1 Dokumen	151,200,000.00
			3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan dan supir kantor yang disediakan dalam 1 tahun		7 Orang	150,400,000.00	9 Orang	172,800,000.00	9 Orang	172,800,000.00	9 Orang	207,360,000.00	9 Orang	248,832,000.00	9 Orang	261,273,600.00	9 Orang	261,273,600.00
			3.27.01.2.03.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	-	1 Laporan	-	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	120,000,000.00	1 Laporan	144,000,000.00	1 Laporan	151,200,000.00	1 Laporan	151,200,000.00
			3.27.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Laporan	124,968,000.00	1 Laporan	370,692,000.00	1 Laporan	550,000,000.00	1 Laporan	704,979,477.00	1 Laporan	845,975,372.40	1 Laporan	888,274,141.02	1 Laporan	888,274,141.02
			3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada Perangkat Daerah	Tersedianya Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya pada Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	-	3 Paket	25,000,000.00	2 Paket	74,979,477.00	2 Paket	89,975,372.40	2 Paket	94,474,141.02	2 Paket	94,474,141.02	2 Paket	94,474,141.02
			3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	-	1 Laporan	125,000,000.00	1 Laporan	150,000,000.00	1 Laporan	180,000,000.00	1 Laporan	189,000,000.00	1 Laporan	189,000,000.00	1 Laporan	189,000,000.00
			3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi		12 Orang	124,968,000.00	25 Orang	370,692,000.00	34 Orang	400,000,000.00	35 Orang	480,000,000.00	35 Orang	576,000,000.00	35 Orang	604,800,000.00	35 Orang	604,800,000.00
			3.27.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Laporan	1,002,376,200.00	1 Laporan	1,216,821,200.00	1 Laporan	1,394,370,480.00	1 Laporan	1,673,244,576.00	1 Laporan	2,007,893,491.20	1 Laporan	1,940,066,771.00	1 Laporan	1,940,066,771.00
			3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun		16 Item	26,072,000.00	16 Item	29,980,000.00	16 Item	30,074,000.00	16 Item	36,088,800.00	16 Item	43,306,560.00	16 Item	45,471,888.00	16 Item	45,471,888.00
			3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan alat tulis kantor yang tersedia dalam 1 tahun		64 Item	203,730,100.00	66 Item	217,253,200.00	66 Item	200,168,800.00	66 Item	240,202,560.00	66 Item	288,243,072.00	66 Item	300,000,000.00	66 Item	300,000,000.00
			3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan makan dan minum yang disediakan dalam 1 tahun		3 Jenis	82,845,000.00	3 Jenis	84,190,000.00	3 Jenis	120,000,000.00	3 Jenis	144,000,000.00	3 Jenis	172,800,000.00	3 Jenis	181,440,000.00	3 Jenis	181,440,000.00
			3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun		17 Item	79,633,100.00	18 Item	90,000,000.00	18 Item	90,000,000.00	18 Item	108,000,000.00	18 Item	129,600,000.00	18 Item	136,080,000.00	18 Item	136,080,000.00
			3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang disediakan; Jumlah langganan surat kabar dalam 1 tahun		20 Media	6,750,000.00	100 buku; 20 Media	50,090,000.00	100 buku; 20 Media	34,730,000.00	100 buku; 20 Media	41,676,000.00	100 buku; 20 Media	50,011,200.00	100 buku; 20 Media	52,511,760.00	100 buku; 20 Media	52,511,760.00
			3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1 tahun		1 Tahun	603,346,000.00	1 Tahun	745,308,000.00	1 Tahun	919,397,680.00	1 Tahun	1,103,277,216.00	1 Tahun	1,323,932,659.20	1 Tahun	1,224,563,123.00	1 Tahun	1,224,563,123.00
			3.27.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan		122 Unit, 29 M2, 1 Paket, 11 Buah	1,351,225,000.00	134 Unit	7,657,954,475.00	61 Unit	7,058,980,346.00	56 Unit	4,380,000,000.00	45 Unit	1,158,777,497.00	40 Unit	982,800,000.00	40 Unit	982,800,000.00
			3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	-	5 Unit	4,000,000,000.00	1 Unit	700,000,000.00	1 Unit	-	0	-	0	-	0	-
			3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	-	7 Unit	3,001,914,475.00	20 Unit	5,708,980,346.00	15 Unit	3,600,000,000.00	5 Unit	222,777,497.00	0	-	0	-
			3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah mebelur kantor yang diadakan dalam 1 tahun		91 Unit, 29 M2	539,845,000.00	57 Unit	251,078,000.00	20 Unit	250,000,000.00	20 Unit	300,000,000.00	20 Unit	360,000,000.00	20 Unit	378,000,000.00	20 Unit	378,000,000.00
			3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun		31 Unit, 1 paket, 11 buah	811,380,000.00	65 Unit	404,962,000.00	20 Unit	400,000,000.00	20 Unit	480,000,000.00	20 Unit	576,000,000.00	20 Unit	604,800,000.00	20 Unit	604,800,000.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja														
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			3.27.01.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah tenaga administrasi dan kebersihan kantor	18 Orang	822,367,000.00	29 Orang	1,111,851,000.00	29 Orang	1,399,037,200.00	29 Orang	1,678,844,640.00	29 Orang	2,014,613,568.00	29 Orang	2,115,344,246.40	29 Orang	2,115,344,246.40	29 Orang	2,115,344,246.40
			3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Feredsiyanya jasa administrasi kantor	Jumlah pelayanan surat masuk dan keluar dalam 1 tahun; Jumlah tenaga administrasi kantor dan UPT	9 Orang	250,400,000.00	240 Surat; 20 Orang	416,400,000.00	240 Surat; 20 Orang	511,800,000.00	240 Surat; 20 Orang	614,160,000.00	240 Surat; 20 Orang	736,992,000.00	240 Surat; 20 Orang	773,841,600.00	240 Surat; 20 Orang	773,841,600.00	240 Surat; 20 Orang	773,841,600.00
			3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiyanya kebutuhan sarana komunikasi, sir dan listrik kantor	Persentase terpenuhi layanan telepon, sir, listrik dan internet dalam 1 tahun	100%	164,728,000.00	100%	238,788,000.00	100%	237,237,200.00	100%	284,684,640.00	100%	341,621,568.00	100%	358,702,646.40	100%	358,702,646.40	100%	358,702,646.40
			3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Layanan Umum Kantor	Feredsiyanya jasa layanan umum kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia dalam 1 tahun	9 Orang	407,239,000.00	9 Orang	456,363,000.00	9 Orang	650,000,000.00	9 Orang	780,000,000.00	9 Orang	936,000,000.00	9 Orang	982,800,000.00	9 Orang	982,800,000.00	9 Orang	982,800,000.00
			3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilakukan Pemeliharaan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 tahun	104 Unit	420,110,000.00	112 Unit	807,825,000.00	126 Unit	935,000,000.00	126 Unit	1,122,000,000.00	126 Unit	1,346,400,000.00	126 Unit	1,413,720,000.00	126 Unit	1,413,720,000.00	126 Unit	1,413,720,000.00
			3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Feredsiyanya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 tahun	6 Unit	104,565,000.00	6 Unit	279,950,000.00	6 Unit	300,000,000.00	6 Unit	360,000,000.00	6 Unit	432,000,000.00	6 Unit	453,600,000.00	6 Unit	453,600,000.00	6 Unit	453,600,000.00
			3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Feredsiyanya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan dalam 1 tahun	7 Unit	95,045,000.00	7 Unit	138,875,000.00	20 Unit	250,000,000.00	20 Unit	300,000,000.00	20 Unit	360,000,000.00	20 Unit	378,000,000.00	20 Unit	378,000,000.00	20 Unit	378,000,000.00
			3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Feredsiyanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor dan mesin lainnya yang dipelihara dalam 1 tahun	90 Unit	120,500,000.00	98 Unit	160,000,000.00	98 Unit	160,000,000.00	98 Unit	192,000,000.00	98 Unit	230,400,000.00	98 Unit	241,920,000.00	98 Unit	241,920,000.00	98 Unit	241,920,000.00
			3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Feredsiyanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	-	0	-	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	120,000,000.00	1 Unit	144,000,000.00	1 Unit	151,200,000.00	1 Unit	151,200,000.00	1 Unit	151,200,000.00
			3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Feredsiyanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	228,700,000.00	1 Unit	125,000,000.00	1 Unit	150,000,000.00	1 Unit	180,000,000.00	1 Unit	189,000,000.00	1 Unit	189,000,000.00	1 Unit	189,000,000.00
Perwujudannya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan serta kesejahteraan pekebun	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Produksi tanaman perkebunan -Karet, (K3-kadar karet kering)	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya penyediaan dan pengembangan sarana perkebunan	Persentase peningkatan sarana produksi perkebunan	75%	622,084,000.00	80%	477,865,902.00	82%	485,658,608.00	85%	491,873,545.00	87%	498,175,838.00	90%	514,047,826.00	90%	514,047,826.00	90%	514,047,826.00
			3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana perkebunan	Jumlah laporan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung perkebunan	1 Laporan	73,525,000.00	1 Laporan	95,000,000.00	3 Laporan	145,000,000.00	3 Laporan	145,000,000.00	3 Laporan	150,000,000.00	3 Laporan	155,000,000.00	3 Laporan	155,000,000.00	3 Laporan	155,000,000.00
			3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Perkebunan sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi; Jumlah CP-CL penerima manfaat kegiatan	1 Laporan	73,525,000.00	1 Laporan	95,000,000.00	1 Laporan; 200 CP-CL	95,000,000.00	1 Laporan; 200 CP-CL	95,000,000.00								
			3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Perkebunan	Jumlah laporan pelaksanaan pendampingan program peremajaan kelapa sawit pekebun (PKSP) yang bersumber dari pendanaan RFDPKS dan atau sumber pendanaan lainnya;	0	-	0	-	2 Laporan	30,000,000.00	2 Laporan	50,000,000.00	2 Laporan	55,000,000.00	2 Laporan	60,000,000.00	2 Laporan	60,000,000.00	2 Laporan	60,000,000.00
			3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan terhadap mutu dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan	Jumlah laporan pengawasan mutu benih/bibit dan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan	0	-	0	-	1 Laporan	60,000,000.00	2 Laporan	60,000,000.00	2 Laporan	60,000,000.00	2 Laporan	70,000,000.00	2 Laporan	70,000,000.00	2 Laporan	70,000,000.00
			3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terlaksananya pengawasan mutu benih/bibit tanaman perkebunan	Jumlah laporan pengawasan mutu benih/bibit tanaman perkebunan;	0	-	0	-	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	35,000,000.00	1 Laporan	35,000,000.00	1 Laporan	35,000,000.00
			3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan/Benih/Bibit Tanaman	Terlaksananya pengawasan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan	Jumlah laporan pengawasan peredaran benih/bibit tanaman perkebunan;	0	-	0	-	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	30,000,000.00	1 Laporan	35,000,000.00	1 Laporan	35,000,000.00	1 Laporan	35,000,000.00
			3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya benih/bibit unggul yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain yaitu berupa bibit karet, kelapa sawit, kelapa, pinang	Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan yang disediakan	20.000 Batang	548,559,000.00	100.000 Batang	382,865,902.00	125.000 Batang	280,658,608.00	125.000 Batang	286,873,545.00	125.000 Batang	288,175,838.00	125.000 Batang	289,047,826.00	125.000 Batang	289,047,826.00	125.000 Batang	289,047,826.00
			3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Feredsiyanya benih/bibit unggul yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain yaitu berupa bibit karet, kelapa, pinang	Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan yang disediakan; Jumlah bibit tanaman perkebunan yang dibuat/diproduksi oleh UPT Pembibitan dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan; jumlah bibit tanaman perkebunan yang diadakan untuk peremajaan/rehabilitasi dan atau extensifikasi	20.000 Batang	548,559,000.00	100.000 Batang	382,865,902.00	125.000 Batang	280,658,608.00	125.000 Batang	286,873,545.00	125.000 Batang	288,175,838.00	125.000 Batang	289,047,826.00	125.000 Batang	289,047,826.00	125.000 Batang	289,047,826.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD		
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Meningkatnya sarana pendukung pertanian mulai dari aspek fasilitas pupuk dan penyediaan bibit (Renstra)	Persentase Peningkatan prasarana produksi Perkebunan		75%	3,041,725,000.00	80%	3,583,994,261.00	82%	3,642,439,563.00	85%	3,689,051,587.00	87%	3,736,318,786.00	90%	3,815,358,697.00	90%	3,815,358,697.00
				3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersedianya data statistik, data harga pasar komoditas dan database pembangunan perkebunan dalam rangka pengembangan perkebunan berkelanjutan	Jumlah laporan data statistik, database pembangunan perkebunan dalam rangka pengembangan perkebunan berkelanjutan		2 Laporan	272,053,000.00	3 Laporan	522,053,000.00	3 Laporan	600,000,000.00	3 Laporan	600,000,000.00						
				3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Tersedianya laporan pengolahan data statistik perkebunan dan data harga pasar komoditas perkebunan	Jumlah laporan pengolahan data statistik perkebunan dan data harga pasar komoditas perkebunan		2 Laporan	272,053,000.00	2 Laporan	272,053,000.00	2 Laporan	300,000,000.00	2 Laporan	300,000,000.00						
				3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan; Rencana Aksi Daerah Kelapa sawit Berkelanjutan (RAD-KSB)	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan; Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa sawit Berkelanjutan (RAD-KSB);		0	-	1 Laporan	250,000,000.00	1 Laporan	300,000,000.00	1 Laporan	300,000,000.00						
				3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya prasarana perkebunan sesuai dengan kebutuhan petani	Jumlah prasarana perkebunan yang dibangun		25 Unit	2,769,672,000.00	20 Unit	3,061,941,261.00	20 Unit	3,042,439,563.00	20 Unit	3,089,051,587.00	20 Unit	3,136,318,786.00	20 Unit	3,215,358,697.00	20 Unit	3,215,358,697.00
				3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Tersedianya jaringan irigasi usaha tani (tali air)	Jumlah jaringan tali air yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan		0	-	0	-	3 Unit	300,000,000.00	3 Unit	300,000,000.00						
				3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya jalan produksi	Jumlah jalan produksi yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan		17 Unit	2,416,421,000.00	10 Unit	2,611,941,261.00	10 Unit	2,142,439,563.00	10 Unit	2,089,051,587.00	10 Unit	2,136,318,786.00	10 Unit	2,215,358,697.00	10 Unit	2,215,358,697.00
				3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Tersedianya sekat kanal	Jumlah sekat kanal yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan		0	-	0	-	2 Unit	200,000,000.00	2 Unit	200,000,000.00						
				3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Tersedianya long storage	Jumlah long storage yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan		0	-	0	-	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00						
				3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Tersedianya pintu air	Jumlah pintu air yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan		2 Unit	215,093,000.00	5 Unit	250,000,000.00	2 Unit	200,000,000.00	10 Unit	200,000,000.00						
				3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Tersedianya balai penyuluh dan sarana pendukungnya di kecamatan	Jumlah Balai Penyuluh Perkebunan di Kecamatan yang dibangun dan tersedia sarana pendukungnya		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
				3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Tersedianya alat, peralatan dan mesin perkebunan dan alat peralatan pengolah tanaman perkebunan	Jumlah alat, peralatan dan mesin perkebunan dan alat peralatan pengolah tanaman perkebunan yang diadakan		6 Unit	138,158,000.00	5 Unit	200,000,000.00	3 Unit	200,000,000.00	3 Unit	200,000,000.00						
				3.27.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Persentase pengendalian bencana produksi Perkebunan</b>		75%	325,203,000.00	80%	676,976,694.00	82%	688,016,362.00	85%	696,820,855.00	87%	705,749,104.00	90%	728,234,421.00	90%	728,234,421.00
				3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah laporan pengendalian lahan dan kebun yang terdampak OPT dan kebakaran lahan		2 Laporan	325,203,000.00	2 Laporan	676,976,694.00	4 Laporan	688,016,362.00	4 Laporan	696,820,855.00	4 Laporan	705,749,104.00	4 Laporan	728,234,421.00	4 Laporan	728,234,421.00
				3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Laporan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan		1 Laporan	164,384,000.00	1 Laporan	346,852,694.00	1 Laporan	300,000,000.00	1 Laporan	300,000,000.00	1 Laporan	300,000,000.00	1 Laporan	305,000,000.00	1 Laporan	305,000,000.00
				3.27.05.2.01.02	Pemangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pemangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Laporan Pemangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Perkebunan		0	-	0	-	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	105,000,000.00	1 Laporan	405,000,000.00
				3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Pemangan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pemangan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Laporan Pencegahan, Pemangan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Perkebunan		1 Laporan	160,819,000.00	1 Laporan	330,124,000.00	1 Laporan	188,016,362.00	1 Laporan	196,820,855.00	1 Laporan	205,749,104.00	1 Laporan	213,234,421.00	1 Laporan	213,234,421.00
				3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Laporan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Perkebunan		0	-	0	-	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	105,000,000.00	1 Laporan	405,000,000.00
				3.27.06	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Meningkatnya usaha perkebunan yang memiliki legalitas</b>	<b>Persentase pengurusan dan perizinan usaha perkebunan</b>		75%	622,474,610.00	80%	358,399,438.00	82%	364,243,970.00	85%	368,905,175.00	87%	373,631,897.00	90%	385,535,890.00	90%	385,535,892.00
				3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan, pengawasan, penilaian usaha perkebunan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha perkebunan	Jumlah rekomendasi izin usaha perkebunan yang diterbitkan yang dilakukan pengawasan		500 STD-B	622,474,610.00	500 STD-B	358,399,438.00	500 STD-B	364,243,970.00	500 STD-B	368,905,175.00	500 STD-B	373,631,897.00	500 STD-B	385,535,890.00	500 STD-B	385,535,892.00
				3.27.06.2.01.01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersedianya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Perkebunan	Jumlah dokumen SOP pelayanan publik Bidang Perkebunan		0	-	0	-	1 Dokumen	64,243,956.00	1 Dokumen	68,905,159.00	1 Dokumen	73,631,879.00	1 Dokumen	75,535,870.00	1 Dokumen	75,535,870.00

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Perimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah laporan persi dokumen pendataan Surat Tanda Daftar Budidaya untuk Budidaya (STD-B) dalam 1 tahun;  Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian lahan perkebunan yang berada dalam kawasan hutan;  Jumlah laporan pelaksanaan penilaian kelas usaha perkebunan  Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan ISPO	Jumlah rekomendasi teknis izin yang dikeluarkan	-	-	500 Persi; 1 Laporan	158,399,426.00	700 persi; 1 laporan	100,000,000.00	1000 persi; 1 laporan	100,000,000.00	1.200 persi; 1 laporan	100,000,000.00	1.200 persi; 1 laporan	110,000,000.00	1.200 persi; 1 laporan	110,000,000.00
			3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Jumlah perusahaan perkebunan yang dilakukan	21 Perusahaan	622,474,600.00	21 Perusahaan	200,000,000.00	21 Perusahaan	200,000,000.00	21 Perusahaan	200,000,000.00	21 Perusahaan	200,000,000.00	21 Perusahaan	200,000,000.00	21 Perusahaan	200,000,000.00
Meningkatnya kesejahteraan petani dengan penghasilan minimal setara UMR			<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Kompetensi SDM Perkebunan Melalui Pembinaan Usaha Perkebun</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Usaha Perkebunan</b>		<b>75%</b>	<b>422,482,200.00</b>	<b>80%</b>	<b>637,154,535.00</b>	<b>82%</b>	<b>647,544,811.00</b>	<b>85%</b>	<b>655,831,393.00</b>	<b>87%</b>	<b>664,234,451.00</b>	<b>90%</b>	<b>685,397,102.00</b>	<b>90%</b>	<b>685,397,102.00</b>
			3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Kompetensi dan Kemandirian Pekebun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Bidang Perkebunan		1 Laporan	422,482,200.00	1 Laporan	637,154,535.00	1 Laporan	647,544,811.00	1 Laporan	655,831,393.00	1 Laporan	664,234,451.00	1 Laporan	685,397,102.00	1 Laporan	685,397,102.00
			3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	1) Jumlah laporan Sosialisasi Pemanfaatan KUR sub sektor Perkebunan; Jumlah petani dan petugas yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan (DPA) 2) Jumlah kelembagaan penyuluh perkebunan; 3) Jumlah UPPB yang dibentuk/dikembangkan.	Penyuluhan	1 Laporan; 20 Orang	121,068,600.00	1 Laporan; 20 Orang; 3 Kelembagaan; 5 Unit	92,154,535.00	1 Laporan; 3 Kelembagaan; 5 Unit	75,000,000.00	1 Laporan; 3 Kelembagaan; 5 Unit	75,000,000.00	1 Laporan; 3 Kelembagaan; 5 Unit	75,000,000.00	1 Laporan; 3 Kelembagaan; 5 Unit	90,000,000.00	1 Laporan; 3 Kelembagaan; 5 Unit	90,000,000.00
			3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	1) Jumlah pekebun/petugas yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas; 2) Fasilitas kelembagaan pekebun		25 Orang; 5 Kelembagaan	301,413,600.00	25 Orang; 5 Kelembagaan	295,000,000.00	25 Orang; 5 Kelembagaan	295,000,000.00	25 Orang; 5 Kelembagaan	295,000,000.00	25 Orang; 5 Kelembagaan	295,000,000.00	25 Orang; 5 Kelembagaan	300,000,000.00	25 Orang; 5 Kelembagaan	300,000,000.00
			3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan		0	-	0	-	1 Paket	32,544,811.00	1 Paket	35,831,393.00	1 Paket	44,234,451.00	1 Paket	45,397,102.00	1 Paket	45,397,102.00
			3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Terbentuknya kelembagaan BUMP	Jumlah Badan Usaha Milik Petani/Pekebun yang dibentuk/difasilitasi		0	-	2 BUMP	125,000,000.00	2 BUMP	120,000,000.00	2 BUMP	125,000,000.00	2 BUMP	125,000,000.00	2 BUMP	125,000,000.00	2 BUMP	125,000,000.00
			3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sekolah Lapang Perkebunan	Jumlah petani/keompok tani yang mengikuti sekolah lapang		0	-	20 Orang	125,000,000.00	20 Orang	125,000,000.00	20 Orang	125,000,000.00	20 Orang	125,000,000.00	20 Orang	125,000,000.00	20 Orang	125,000,000.00
									<b>16,734,129,753.00</b>		<b>26,999,423,448.00</b>		<b>27,439,711,388.00</b>		<b>27,790,855,305.60</b>		<b>28,146,934,873.72</b>		<b>29,003,702,207.00</b>		<b>29,003,702,209.00</b>

Tabel 6.2  
KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

RPJMD 2021 – 2026					RENSTRA DISBUN				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Bidang		
Memperkokoh perekonomian daerah dan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam, potensi pesisir dan kemaritiman	Meningkatnya Kontribusi Non Migas terhadap Perekonomi daerah	Share Sektor Non Pertambangan terhadap PDRB (%)	Penguatan ekonomi petani dan nelayan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pemberian Stimulus ekonomi dan penyediaan sarana prasarana pendukung bagi petani dan nelayan</li> <li>Terwujudnya pengelolaan potensi pesisir dan kemaritiman</li> </ul>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi kantor	Sekretariat		
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persentase tersedianya sarana pertanian	Bidang PSP		
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Persentase tersedianya prasarana pertanian	Bidang Produksi		
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Sekretariat		
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan usaha perkebunan	Bidang PSP		
							Bidang Produksi		
							Bidang Perlindungan Perkebunan		
							Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		
					Menyediakan lahan pertanian dalam kawasan hutan	Fasilitasi lahan pertanian pada kawasan hutan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Persentase tersedianya sarana pertanian	Bidang PSP
							Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Persentase tersedianya prasarana pertanian	Bidang Produksi
Program Perizinan Usaha Pertanian Perkebunan	Persentase penerbitan izin usaha perkebunan	Sekretariat							
						Bidang PSP			
						Bidang Produksi			
						Bidang Perlindungan Perkebunan			

Tabel 6. 3  
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
Berdasarkan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5	02	01	2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5	02	01	2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5	02	01	2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
5	02	01	2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5	02	01	2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5	02	01	2.07	05	Pengadaan Meubeler
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	02	01	2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	02	01	2.08	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5	02	01	2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
3	27	03	2.01	04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3	27	06	2.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3	27	07	2.01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel 6.4  
Rencana program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi; Jumlah CP-CL penerima manfaat kegiatan	1 Laporan	73,525,000	1 Laporan	95,000,000	1 Laporan: 200 CP-CL	190,000,000	1 Laporan: 200 CP-CL	228,000,000	1 Laporan: 200 CP-CL	273,600,000	1 Laporan: 200 CP-CL	328,320,000
	Jumlah bibit unggul tanaman perkebunan yang disediakan	100.000 Batang	409,621,000	100.000 Batang	2,500,000,000	100.000 Batang	2,750,000,000	100.000 Batang	3,025,000,000	100.000 Batang	3,327,500,000	100.000 Batang	3,660,250,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah laporan dan data prasarana pendukung pertanian lainnya/Jumlah laporan dan data kegiatan fasilitasi kebun masyarakat didalam kawasan hutan.	2 Laporan	272,053,000	3 Laporan	472,053,000	2 Laporan	500,000,000	2 Laporan	550,000,000	2 Laporan	605,000,000	2 Laporan	665,500,000
	Jumlah dokumen pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan	0	-	1 Dokumen	380,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	0	-	0	-	0	-
	Jumlah panjang jaringan tali air yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan	0	-	0	-	1 KM	1,500,000,000	1 KM	1,800,000,000	1 KM	2,160,000,000	1 KM	2,592,000,000
	Jumlah jalan produksi yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan	12 Unit	2,416,421,000	12 Unit	2,500,000,000	10 Unit	3,000,000,000	10 Unit	3,600,000,000	10 Unit	4,320,000,000	10 Unit	5,184,000,000
	Jumlah sekat kanal yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan	0	-	0	-	5 Unit	500,000,000	5 Unit	600,000,000	5 Unit	720,000,000	5 Unit	864,000,000
	Jumlah pintu air yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan	2 Unit	215,093,000	5 Unit	300,000,000	5 Unit	1,500,000,000	5 Unit	1,800,000,000	5 Unit	2,160,000,000	5 Unit	2,592,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah laporan pengendalian OPT yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Laporan	164,384,000	1 Laporan	180,000,000	1 Laporan	216,000,000	1 Laporan	259,200,000	1 Laporan	311,040,000	1 Laporan	373,248,000
	Jumlah laporan pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang dilaksanakan	1 Laporan	160,819,000	1 Laporan	340,000,000	1 Laporan	408,000,000	1 Laporan	489,600,000	1 Laporan	587,520,000	1 Laporan	705,024,000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah dokumen SOP pelayanan publik Bidang Perkebunan	0	-	5 Dokumen	250,000,000	5 Dokumen	300,000,000	5 Dokumen	360,000,000	5 Dokumen	432,000,000	5 Dokumen	518,400,000
	Jumlah rekomendasi teknis izin yang dikeluarkan	0	-	2 Rekom	75,000,000	2 Rekom	250,000,000	2 Rekom	300,000,000	2 Rekom	360,000,000	2 Rekom	432,000,000
	Jumlah dokumen usulan pendaftaran usaha perkebunan	500 Dokumen	622,474,600	500 Dokumen	600,000,000	500 Dokumen	660,000,000	500 Dokumen	726,000,000	500 Dokumen	798,600,000	500 Dokumen	878,460,000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah laporan pemanfaatan KUR sub sektor perkebunan: Jumlah kelembagaan penyuluh perkebunan: Unit pengolahan hilir karet yang dibangun	1 Laporan: 1 Kelembagaan	121,068,600	1 Laporan: 3 Kelembagaan: 1 Unit	1,075,000,000	1 Laporan: 3 Kelembagaan: 1 Unit	2,090,000,000	1 Laporan: 3 Kelembagaan: 1 Unit	3,608,000,000	1 Laporan: 3 Kelembagaan: 1 Unit	2,129,600,000	1 Laporan: 3 Kelembagaan: 1 Paket	2,155,520,000
	Jumlah petani dan petugas yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan: Fasilitasi kelembagaan petani pekebun	50 Orang	301,413,600	50 Orang: 1 Kelembagaan	450,000,000	50 Orang: 1 Kelembagaan	495,000,000	50 Orang: 1 Kelembagaan	544,500,000	50 Orang: 1 Kelembagaan	598,950,000	50 Orang: 1 Kelembagaan	658,845,000
	Jumlah Badan Usaha Milik Petani/pekebun yang dibentuk	0	-	2 BUMS	155,000,000	2 BUMS	170,500,000	2 BUMS	187,550,000	2 BUMS	206,305,000	2 BUMS	226,935,500
	Jumlah petani/keompok tani yang mengikuti sekolah lapang	0	-	20 Orang	200,000,000	100 Orang	1,000,000,000	100 Orang	1,100,000,000	100 Orang	1,210,000,000	100 Orang	1,331,000,000



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan pembantuan dibidang Perkebunan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja

yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan pembangunan perkebunan yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Selengkapnya target-target capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu untuk periode Tahun 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan  
Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)							
	a. Karet (K3 = Kadar Karet Kering)	19,142	19,342	19,542	19,742	19,942	20,142	20,142
	b. Kelapa (Kopra setara = 4,5 butir kelapa)	4,062	4,112	4,162	4,212	4,262	4,312	4,312
	c. Kelapa sawit (setara Cpo)	262,292	262,500	263,000	263,500	264,000	265,000	265,000
	d. Sagu (Tepung sagu kering)	3,189	3,489	3,789	4,089	4,389	4,689	4,689
2.	Produktivitas Tanaman Perkebunan (Ton/Ha)							
	a. Karet (K3 = Kadar Karet Kering)	0.908	0,928	0,948	0,968	0,988	1.008	1.008
	b. Kelapa (Kopra setara = 4,5 butir kelapa)	0.893	0.913	0.933	0.953	0.973	0.993	0.993
	c. Kelapa sawit (setara Cpo)	2.305	2.307	2.309	2.311	2.313	2.315	2.315
	d. Sagu (Tepung sagu kering)	1.886	1.888	1.890	1.892	1.894	1.896	1.896
3.	a. Nilai Tukar Petani (NTPR)	101	101	102	103	104	105	105
	b. Persentase pekebun dengan penghasilan minimal setara UMR	62.67	62.67	62.68	62.69	62.70	62.71	62.71
4.	a. Predikat Evaluasi SAKIP	B	B	B	BB	BB	BB	BB
	b. Persentase temuan Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	100	100

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat 4 (empat) indikator sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu dalam rangka pengkajian dan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.

## BAB VIII PENUTUP

### 8.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Bapenda sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen

Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

## 8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra Perangkat Daerah, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
- 3) Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- 4) Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkulu tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP.

- 5) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
- 6) Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan stakeholder pembangunan.